



# KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453  
BANDUNG

## SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor W.i/HK.008/ 326 /19.89.

Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

### KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

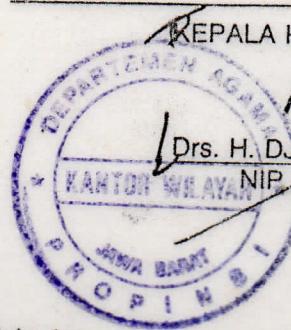
- Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;  
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;  
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan peridikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;  
2. Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;  
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;  
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama R.I No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;  
5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;  
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kampung Rawa Kalieung Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya .....  
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah ... Tsanawiyah ..... Negeri.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surai Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah ... Tsanawiyah ....., Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 1 Nopember 1989.

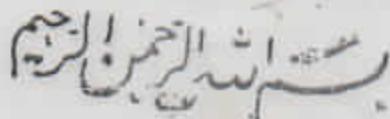


SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I
- U.p. a. Sekjen Departeman Agama di Jakarta;
- b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
- c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
- d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;

# PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 2815/II-040/JB-70/79.



Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

MADRASAH TSAYAH MUHAMMADIYAH

berkedudukan di Ds. Linggawangi-Leuwisari adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majlis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang :

Daerah : Tasikmalaya

Wilayah : Jawa Barat

didirikan tanggal : 1 Januari 1970 dan telah terdaftar pada Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 2815/II-040/JB-70/79,

Wilayah No. 50/XII-04/79,

Daerah No. 05/MTs-02/79.

Plagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Jawa Barat No. E-4/082/1979 tgl. 5 Syawal 1399-H dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

9 Syawal 13...99 H

1 September 19...79 M

Ketua



Drs. Haibah HS.

(H.A.S Prod jokiusmo)

Drs. Haibah HS.

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT REGLUIT L. ED. 8-1914 NO 91. 1818-1880 NO 40, TOL 2+3+1922 NO 34, SURAT DEP. KEMERIAHAN TOL. 8+9-1971 NO 2A 8/18074.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TOL. 10+1-1978 NO 8K 14/2004/1978 DAN SURAT DEP. P. K. TOL. 2+3-1974 NO 22222/MPA/74.